

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini hendak menjelaskan tentang peran dari Lembaga Masyarakat Adat (LMA) pada penegasan Batas Wilayah di Kabupaten Keerom. Jenis penelitian yang di gunakan adalah Kualitatif dengan menggunakan pendekatan analisis deskriptif, yang mana pada tahapan ini peneliti ingin menemukan tingkat keberdayaan organisasi dan bagaimana pembentukan keberdayaan dari organisasi. Hasil dari penelitian ini bahwa di Kabupaten Keerom terdapat Lembaga Masyarakat Adat yang bertugas untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan berbagai persoalan - persoalan yang ada dalam masyarakat yang berkenaan dengan hukum adat - istiadat. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, lembaga masyarakat adat juga diberikan kewajiban untuk membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan dan pembinaan kemasyarakatan. Salah satu objek kewajiban dari LMA ialah membantu pemerintah untuk menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, termaksud penegasan batas wilayah administrasi yang selalu menimbulkan permasalahan secara terus - menerus. Kesimpulan penelitian ini dapat menjelaskan sejauh mana tingkat keberdayaan lembaga masyarakat adat pada penegasan batas wilayah. Terdapat beberapa permasalahan yang di hadapi LMA dalam proses penegasan batas wilayah seperti, kurangnya sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan atau kompetensi, letak dan jarak antar kampung yang begitu jauh serta terdapat dua organisasi yang menjalankan tugas dan fungsi yang sama dalam satu daerah menjadi faktor penghambat. Sejauh ini belum ada keterlibatan dari lembaga masyarakat adat bersama pemerintah daerah untuk menyelesaikan penegasan batas wilayah di Kabupaten Keerom.

Kata Kunci : Pemberdayaan, Lembaga Masyarakat Adat, Penegasan Batas Wilayah

ABSTRACT

The purpose of this research is to explain the role of the Lembaga Masyarakat Adat (LMA) in confirming the boundaries in Keerom Regency. The type of research used is Qualitative using a descriptive analysis approach, which at this stage the researcher wants to find the level of organizational empowerment and how the formation of organizational empowerment. The result is that there is a Lembaga Masyarakat Adat in Keerom Regency whose task is to accommodate and channeling the aspirations of the community to the government, solve various problems that exist in the community with regard to customary law. In carrying out their duties and functions, indigenous peoples' institutions are also given the obligation to assist the smooth running of government administration, implementation and community development. One of the objects of the LMA's obligation is to assist the government to resolve various conflicts that occur, including the affirmation of administrative boundaries that always cause problems continuously. The conclusion of this research can explain the extent to which the level of empowerment of indigenous peoples organizations in the affirmation of territorial boundaries. There are several problems faced by the LMA in the process of confirming boundaries, such as the lack of human resources who have the ability or competence, the location and distance between villages that are so far away and there are two organizations that carry out the same duties and functions in one area. Thus far, there has been no involvement from indigenous peoples' organizations with the local government to resolve boundaries in Keerom Regency.

Keywords: *Empowerment, Lembaga Masyarakat Adat, Territorial Boundary Affirmation*